

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asikin, Amirudin dan Zainal. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.

Brotodiharjo, R. Santoso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. 3*.  
Bandung : PT. Eresco Bandung.

Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang  
Kenotariatan (Buku Kesatu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Busro, Achmad. 2013. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta:  
Pohon Cahaya.

Cohen, Morris L. 1980. *The Nature of the Legal Process*. New York: Harper  
& Row.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Perdata Indonesia: Buku II Hukum  
Perikatan*. Bandung: PT Alumni.

Harahap, Muhammad Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata Tentang  
Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan  
Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan  
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta:  
Djambatan.

HS, Salim. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Latumenten, Peiter. 2018. *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik*

*Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accesoir*.

Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mamudji, Sri. Dkk. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1.

Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.

Meliala, Djaja S. 1982. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang*

*Hukum Perdata*. Bandung: Tarsito.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi, dan Pati, Sakka. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna*

*Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2012. *Hukum*

*Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Parlindungan, Adi Putera. 2020. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*

*(Berdasarkan PP. No24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Bandung: Mandar Maju.

Perangin, Efendi. 1989. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari*

*Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim HS. Abdullah. Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Cetakan Kedua*.

Jakarta: PT Sinar Grafika.

Salim, Salim Hairus dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pres.

Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Setiawan, I Ketut Eka. 2021. *Hukum Agraria*. Bandung: Reka Cipta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2008. *Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 1994. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Subekti. R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht. 1999. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.

W.J.S. Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX*. Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 594/1492/AGR tentang Penggunaan Kuasa Mutlak Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Dasar Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### C. Jurnal

Alusianto Hamonangan, Mhd. Taufiqurrahman, dan Rosma Mediana Pasaribu. 2021. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan*. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2.

E. Rahmi. 2016. *“Wajah Baru” PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT, Jurnal Notariil, Vol.1.*

Kusuma, I Made Krishna Dharma. Dkk. 2020. *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Setiawan dan Suryawati. 2024. *Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum Yang Sah*. *Wajah Hukum*, Vol. 8. No. (2).

**D. Tesis**

Andriany, Natalia. 2018. *Keabsahan Kuasa Jual Dengan Hak Substitusi Dalam Hal Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*. Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Dinnar, Fauzia Tifany. 2017. *Pembuatan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Prayoto. 2009. *Aspek Hukum Terhadap Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*. Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

